



## Determinasi Belanja Operasional Dan Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Lhokseumawe

Cut Miftahul Jannah<sup>1</sup>, Indra Wijaya<sup>2</sup>, Mustika Amri<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Politeknik Negeri Lhokseumawe

Alamat: Jalan Medan Banda Aceh, Km. 280, Buketrata, Kota Lhokseumawe

Penulis Korespondensi; [miftahabj188@gmail.com](mailto:miftahabj188@gmail.com)

**Abstract:** Poverty is a complex problem caused by many interrelated factors. Operational expenditure and capital expenditure are considered to influence poverty levels. The aim of this research is to determine the influence of operational expenditure and capital expenditure on poverty in Lhokseumawe City. This research uses a multiple regression analysis method to see the influence between the independent variables (Operational Expenditures and Capital Expenditures) and the dependent variable (Poverty Level). The research method used is a quantitative method. The results of this research show that operational expenditure has a negative and significant effect on the poverty level in Lhokseumawe City, meaning that if operational expenditure increases, the poverty level in Lhokseumawe City will tend to decrease. However, capital expenditure does not have a significant influence on the poverty level in Lhokseumawe City for the 2007-2023 period. Recommendations to local governments to prioritize increasing the budget for operational expenditure and to evaluate capital expenditure.

**Keywords:** APBD, Operational Expenditures, Capital Expenditures, Poverty Level

**Abstrak:** Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait. Belanja operasional dan belanja modal dianggap dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk mendeterminasi pengaruh belanja operasional dan belanja modal terhadap kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh antara variabel independen (Belanja Operasional dan Belanja Modal) dengan variabel dependen (Tingkat Kemiskinan). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kota lhokseumawe, artinya jika belanja operasional meningkat maka tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe akan cenderung menurun. Namun belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe periode tahun 2007-2023. Rekomendasi kepada pemerintah daerah agar lebih memprioritaskan peningkatan anggaran untuk belanja operasional serta perlu dilakukan evaluasi terhadap belanja modal.

**Kata Kunci:** APBD, Belanja Operasional, Belanja Modal, Tingkat Kemiskinan

### LATAR BELAKANG

Belanja daerah merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, termasuk pengentasan kemiskinan. Penyelenggaraan pemerintah daerah sangatlah berkaitan dengan penggunaan serta pemanfaatan anggaran dan pendapatan daerah. Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat perencanaan untuk mencapai target dan sebagai kontrol alokasi sumber daya publik. Bahkan, pengelolaan APBD juga menceeminkan kapabilitas Pemda yang notabene merupakan tanggung jawab dan hak wewenang pemda pada tataran otonomi. Keberhasilan otonomi daerah erat kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

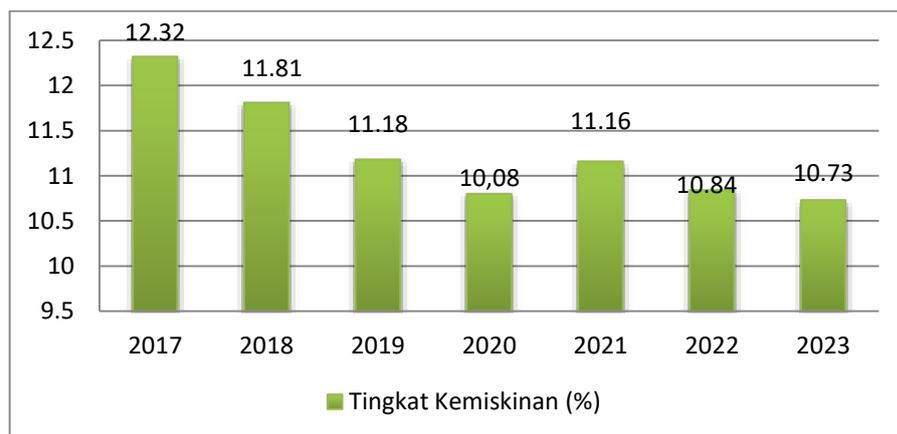
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, termasuk pada belanja pemerintah. Terdapat 2 (dua) jenis belanja pemerintah yaitu belanja modal (pengeluaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti: pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan) dan belanja operasional (belanja yang

digunakan untuk mendanai kegiatan yang secara tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti; Gaji karyawan, bunga pinjaman dan subsidi).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengeluaran langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sebaliknya, belanja tidak langsung berdampak positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat (Ishak, 2017). Disisi lain, belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki pengaruh simultan dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Sedangkan secara parsial, belanja langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja tidak langsung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, (Prisilia, et.all, 2020). Kajian lain mengindikasikan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan secara parsial belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan, (Rahmat, et.all, 2022). Kajian atas determinasi belanja APBDesa Kota Lhokseumawe hanya relatif kecil dapat menjelaskan (pengentasan) tingkat kemiskinan, (Apriyani, Indra, Kheriah, 2024).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor ekonomi, sosial, politik, geografis, serta lingkungan. Contohnya seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah maka peluang kerja akan terbatas dan pengangguran meningkat, contoh lainnya jika pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan dapat meningkatkan tekanan pada sumber daya yang terbatas, seperti air, tanah, dan pangan. Hal ini dapat membuat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar semua penduduk dan dapat menyebabkan kemiskinan. Selain itu belanja operasional dan belanja modal dianggap dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Lokasinya strategis sebagai pusat ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan. Selama periode 2017-2023, kemiskinan tertinggi terjadi tahun 2017.



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2024

**Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Kota Lhokseumawe 2017-2023 (%)**

Disi lain, salah satu cermin dari peran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam upaya pengentasan kemiskinan tampak pada pola APBD (khususnya belanja), baik belanja operasional maupun belanja modal. Melalui tabel dibawah, realisasi belanja

operasional dan modal menunjukkan trend meningkat. Keduanya mengalami kenaikan setiap tahunnya, hanya saja belanja operasional tertinggi terjadi tahun 2020 sedangkan belanja modal tertinggi terjadi tahun 2019.

**Tabel 1. Belanja Operasional dan Modal Kota Lhokseumawe, 2017–2023 (dalam Rupiah)**

Tahun	Realisasi Belanja Operasional	Realisasi Belanja Modal
2007	Rp. 176.449.462.523	Rp. 199.963.171.603
2008	Rp. 216.265.453.613	Rp. 204.516.293.118
2009	Rp. 243.890.916.788	Rp. 186.312.958.537
2010	Rp. 247.313.111.020	Rp. 154.401.276.993
2011	Rp. 311.944.636.087	Rp. 209.479.841.346
2012	Rp. 343.660.915.866	Rp. 228.981.604.244
2013	Rp. 385.666.850.834	Rp. 247.330.030.739
2014	Rp. 406.641.590.656	Rp. 320.839.313.764
2015	Rp. 542.845.749.154	Rp. 336.224.445.226
2016	Rp. 561.329.152.430	Rp. 329.009.196.536
2017	Rp. 419.468.840.172	Rp. 450.699.552.064
2018	Rp. 399.988.550.303	Rp. 375.491.482.991
2019	Rp. 412.220.469.101	Rp. 461.245.135.417
2020	Rp. 427.881.411.076	Rp. 381.233.932.993
2021	Rp. 528.185.317.468	Rp. 140.433.182.319
2022	Rp. 563.408.052.513	Rp. 142.497.457.379
2023	Rp. 548.509.273.989	Rp. 60.336.467.761

*Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe, Tahun 2024 (diolah)*

## KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaa, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuanga daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, (Tumbo, 2019). Struktur pengelolaan keuangan daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (Anwar, 2019). APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan.

APBD adalah rencana pelaksanaan seluruh pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk tahun anggaran tertentu. Tujuan pengumpulan seluruh pendapatan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD (belanja daerah) dan komitmen sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi yang dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Hal ini merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan sebagai pelindung dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek, (BPKK Banda Aceh, 2021). Menurut mahmudi dalam (Sekarningtyas & Rachmawati, 2022) menjelaskan bahwa belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau bersifat rutin. Jadi dapat disimpulkan bahwa belanja operasi adalah komponen penting dalam pengelolaan keuangan organisasi, terutama pemerintahan daerah, meliputi: belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan social.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat jangka panjang yang lebih dari satu periode. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud dan pengeluaran setelah perolehan yang menambah nilai aset yang bersangkutan (*Subsequent Expenditures*), (BPKK Banda Aceh, 2021). Menurut (Putri, 2022) belanja modal adalah salah satu jenis belanja langsung dalam APBN/APBD, belanja modal merupakan belanja daerah yang dipakai oleh pemerintah daerah untuk keperluan fasilitas pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, transportasi, kesehatan sehingga masyarakat bisa menikmati sarana dan prasarana dari pembangunan daerah. Klasifikasi belanja modal meliputi : tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan-irigasi-jaringan, dan belanja modal lainnya.

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi standar kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan secara umum diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya kemampuan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti akses terhadap makanan bergizi dan kebutuhan kalori yang cukup, pakaian yang sesuai untuk perlindungan terhadap cuaca dan kebutuhan sosial, serta tempat tinggal yang aman dan sehat untuk perlindungan, (Bappenas, 2018). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi hidup serba kekurangan yang dialami oleh seseorang yang pengeluaran per kapita bulannya

tidak mencukupi untuk memenuhi standar hidup minimum. Indikator-indikator tingkat kemiskinan yaitu pengeluaran minimum bulanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum.

### **METODE PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada determinasi pengaruh belanja operasional dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di kota Lhokseumawe melalui penelitian deskriptif dengan data sekunder yang bersifat kuantitatif dengan periode tahun 2007-2023 (data seri waktu atau *time series*), dengan metode regresi linear berganda,  $Y = b_0 + b_1LnX_1 + b_2LnX_2 + e$

Keterangan:

Y = Tingkat Kemiskinan (variabel dependen)

$b_0$  = Konstanta

$X_1$  = Belanja Operasional

$X_2$  = Belanja Modal

e = Kesalahan

Uji asumsi klasik ini dilakukan agar memperoleh model regresi yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan parameter uji normalitas, uji autokolerasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, (Sugiyono, 2014). Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikan secara parsial (uji t) dan secara simultan (uji F) pada tingkat signifikansi 0,05 untuk keduanya. Selanjutnya, pengamatan terhadap koefisien determinasi ( $R^2$ ) juga menggunakan nilai Adjusted  $R^2$ .

**Tabel 2. Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pengukuran</b>	<b>Skala</b>
Belanja Operasional (X1)	Belanja operasional adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sehari-hari, yang dapat memberikan manfaat jangka pendek.	Realisasi Belanja Operasional APBD	LN	Rasio
Belanja Modal (X2)	Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat jangka panjang yang lebih dari satu periode.	Realisasi Belanja Modal APBD	LN	Rasio
Peresentase Tingkat Kemiskinan (Y)	Kemiskinan sebagai suatu kondisi hidup serba kekurangan yang dialami oleh seseorang yang pengeluaran per kapita bulannya tidak mencukupi untuk memenuhi standar hidup minimum.	Persentase tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe	Persen	Rasio

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Belanja operasional adalah pengeluaran yang tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Pengeluaran ini umumnya bersifat penunjang dan tidak memiliki manfaat langsung yang dapat dirasakan dalam mencapai tujuannya. belanja operasional meliputi; Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga. Berikut ini disajikan tabel perkembangan anggaran dan realisasi belanja APBD Kota Lhokseumawe tahun 2007-2023.

**Tabel 3. Anggaran Dan Realisasi Belanja Operasional (Rp)**

Tahun	Realisasi Belanja Operasional	Anggaran Belanja Operasional
2007	176.449.462.523,00	199.756.568.214,00
2008	216.265.453.613,00	232.725.158.060,00
2009	243.890.916.788,00	258.277.127.702,00
2010	247.313.111.020,00	258.838.844.029,00
2011	311.944.636.087,00	326.744.062.742,00
2012	343.660.915.866,00	365.897.204.242,00
2013	385.666.850.834,00	409.726.706.260,59
2014	406.641.590.656,00	416.491.379.317,84
2015	542.845.749.154,00	445.101.725.931,00
2016	561.329.152.430,00	718.014.496.030,00
2017	419.468.840.172,00	460.177.099.949,23
2018	399.988.550.303,00	449.090.273.605,09
2019	412.220.469.101,45	447.300.731.852,79
2020	427.881.411.076,00	448.815.350.792,29
2021	528.185.317.468,00	590.366.995.636,00
2022	563.408.052.513,00	605.522.237.180,00
2023	548.509.273.989,00	595.256.623.128,00

Sumber: Kantor BPKD Lhokseumawe, 2024

Belanja modal adalah pengeluaran yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Pengeluaran ini memiliki manfaat yang langsung dapat dirasakan dalam mencapai tujuannya. Contoh-contoh belanja modal meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Berikut ini tabel perkembangan anggaran dan realisasi belanja modal APBD tahun 2007-2023 di Kota Lhokseumawe :

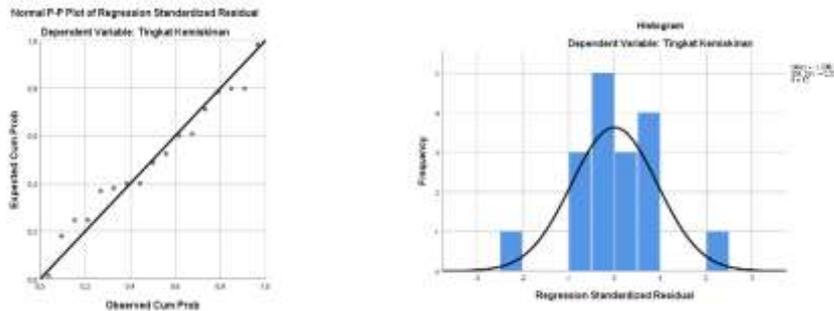
**Tabel 4. Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal (Rp)**

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Anggaran Belanja Modal
2007	199.963.171.603,00	265.391.451.792,00
2008	204.516.293.118,00	241.710.006.270,00
2009	186.312.958.537,00	211.143.060.731,00
2010	154.401.276.993,00	162.841.844.190,00
2011	209.479.841.346,00	221.926.154.212,00
2012	228.981.604.244,00	251.100.173.574,00
2013	247.330.030.739,00	268.195.120.885,00
2014	320.839.313.764,00	424.108.490.449,00
2015	336.224.445.226,00	618.531.015.478,00
2016	329.009.196.536,00	419.402.819.677,00
2017	450.699.552.064,00	492.283.190.315,16
2018	375.491.482.991,00	411.814.295.559,72
2019	461.245.135.417,00	501.194.517.660,00
2020	381.233.932.993,07	449.394.961.057,00
2021	140.433.182.319,19	168.374.880.958,00

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Anggaran Belanja Modal
2022	142.497.457.379,00	156.583.508.120,00
2023	60.336.467.761,00	82.331.873.436,00

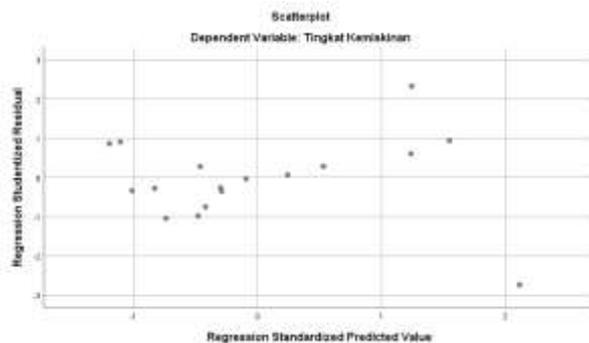
Sumber: Kantor BPKD Lhokseumawe, 2024

Uji normalitas menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi sebesar  $0,200 > 0,05$ , yang disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selain itu, juga dengan menggunakan Histogram (*Normal P-Plot Regression Standardized Residual*) yang juga mengindikasikan data berdistribusi normal.



Gambar 2. Uji Normalitas Kurva P-Plot dan Grafik Histogram

Uji heteroskedastisitas mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat antara tingkat kemiskinan dan residual studentized. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas sehingga model regresi baik dan ideal substruktur dapat terpenuhi.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian regresi, dapat disimpulkan bahwa yang memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap kemiskinan di Kota Lhokseumawe adalah belanja operasional ( $X_1$ ). Lebih lanjut dapat disusun persamaan menjadi:  $Y = 123,788 - 3,854 X_1 - 0,322 X_2 + e$

Tabel 5 Hasil Output Coefficients (Regresi )

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

1	(Constant)	123,788	28,156		4,397	,001		
	Belanja Operasional	-3,854	,893		-,751	-4,317	,001	,998
	Belanja Modal	-,322	,614		-,091	-,524	,608	,998

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber: hasil olah data SPSS 25, 2024

Nilai koefisien belanja operasional sebesar (3,854) yang mengindikasikan arah negatif. Hal ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan Rp1 dalam Belanja Operasional, tingkat kemiskinan diperkirakan menurun sebesar -3,854. Sedangkan koefisien belanja modal adalah (0,322) yang juga mengindikasikan arah negatif. Hal ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan Rp1 pada belanja modal, tingkat kemiskinan diperkirakan menurun sebesar -0,322. Nilai t untuk belanja operasional adalah (4,317) pada signifikansi 0,001. Hal ini berarti belanja operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan Nilai t untuk belanja modal sebesar (0,524) pada signifikansi 0,608. Hal ini berarti bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Uji signifikansi simultan diamati pada nilai  $F_{hitung}$  sebesar sebesar 9,567 sedangkan nilai  $F_{table}$  sebesar 3, 74. Mengingat nilai Sig. 0,002 maka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Lhokseumawe (Y).

**Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31,194	2	15,597	9,567	,002 <sup>b</sup>
	Residual	22,824	14	1,630		
	Total	54,017	16			

Sumber: data diolah, 2024

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen dapat dijelaskan oleh variasi eksogen. Berikut hasil koefisien determinasi pada kajian ini:

**Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,760 <sup>a</sup>	,577	,517	1,27682	1,282

Sumber: hasil olah SPSS, 2024

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,577, yang berarti variabel belanja operasional dan belanja modal mampu menjelaskan kemiskinan sebesar 57,7%. Sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,517 atau 51,7%.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sama dengan Teori neo-institusionalisme, yang dikembangkan oleh Douglas North dan Douglass C. North, yang berpendapat

bahwa institusi, seperti aturan dan norma, memainkan peran penting dalam ekonomi. Teori ini berpendapat bahwa belanja operasional pemerintah bisa membantu membangun institusi tersebut menjadi kuat dan inklusif, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian ini berbeda dengan Teori Keynesian, yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, berpendapat bahwa peningkatan belanja pemerintah, termasuk belanja modal, dapat meningkatkan permintaan agregat dalam ekonomi. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa secara parsial belanja operasional mampu mendeterminasi tingkat kemiskinan, sedangkan belanja modal secara parsial tidak mendeterminasi tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Disisi lain, secara simultan, belanja operasional dan belanja modal mampu menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil kajian diatas, maka rekomendasi atau saran antara lain: agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan peningkatan anggaran untuk belanja operasional serta perlu dilakukan evaluasi terhadap belanja modal. Selain itu, penelitian ini perlu dikembangkan lagi dengan menambah variabel-variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, serta kondisi geografis dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anwar Saiful, (2019). **Struktur, Penyusunan Dan Penetapan Apbd**. E-Jurnal Universitas Brawijaya, 5.
- Apriyani Geubrina, Indra Wijaya, Kheriah, (2024), Determinasi Belanja APBDesa terhadap Tingkat Kemiskinan di Lhokseumawe, Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, Vol.2, No.4, Oktober 2024, <https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jkpim/article/view/486>
- Bappenas. (2018). **Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi**. Kedeputian Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan, 1–80.
- BPKK Banda Aceh. (2021). **Kebijakan Akuntansi Nomor 17 Akuntansi Belanja**. [Bpkk.Bandaacehkota.Go.Id](https://bpkk.bandaacehkota.go.id), 1–4. <https://bpkk.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Lampiran-18-KEBIJAKAN-AKUNTANSI-BELANJA.pdf>
- Ishak Jauhar Rarouk (2017). **Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan**. Jurnal Akuntansi & Bisnis. Vol17, No.1
- Prisilia, Josep, Hanly, & Siwu (2020). **Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja**

**Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.** Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol2. No.01

- Putri, T. R. (2022). **Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020.** *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1). <https://eprints.unpk.ac.id/5486/>
- Rahmat, Runi, & Ningsi (2022). **Rasio Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Provinsi Sulawe Tenggara Tahun 2017-2021.** JURIMEA VOLS 2. No. 2
- Sekarningtyas, & Rachmawati, (2022). **Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.** September, 110–129. <Http://Eprints.Uty.Ac.Id/9782/>
- Sugiyono (2010). **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.** In Penerbit Alfabeta.
- Tumbo Sumule (2019). **Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Ilmu Pemerintahan,** 1–28.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). **Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.** In Dpr. <Http://Www.Dpr.Go.Id/Dokjdih/Document/Uu/33.Pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003.** In Demographic Research (Vol.49,Issue 0).